

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Di Desa Oabikase melalui tiga indikator yaitu:

1. Unsur pelaksanaan, pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* bertujuan mengatasi kemiskinan, kesehatan dan sanitasi, namun pelaksanaan yang ada di desa Oabikase kurang baik, masih terdapat kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan SDGs seperti keterbatasan SDM, pemerintah desa tidak transparan mengenai anggaran, tidak semua masyarakat merasakan manfaat pembangunan berkelanjutan, program yang diturunkan tidak tepat sasaran dan ada program yang tidak diselesaikan.
2. Adanya program yang dilaksanakan, pengadaan program yang ada di desa Oabikase cukup baik dengan pembangunan infrastruktur, pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, dan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Namun adanya ketidakpuasan dari masyarakat terhadap efektivitas program-program tersebut.
3. Kelompok sasaran, suatu program yang di jalankan tentunya memiliki tujuan dan sasaran yang tepat. Pemilihan sasaran di desa Oabikase dinilai kurang baik karea pemerintah desa menggunakan nepotisme dalam memilih sasaran sehingga masih terdapat beberapa masyarakat

yang memiliki rumah tidak layak huni dan fasilitas sanitasi seperti wc yang sudah rusak.

5.2 Saran

- a. Pemerintah desa Oabikase perlu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam mengimplementasikan program SDGs di desa Oabikase dan membuat program sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari program yang diimplementasikan. Dan terbuka mengenai anggaran dan program yang dijalankan.
- b. Pemerintah desa Oabikase sebaiknya melihat kebutuhan masyarakat dengan merencanakan program dengan baik, mulai dari pembuatan tim pelaksana, sosialisai kesehatan, pengadaan fasilitas yang lengkap sehingga program yang diimplemntasikan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakat desa.
- c. Pemerintah desa Oabikase harusnya memiliki keterbukaan atau transparan dengan masyarakat dengan mengadakan musyawarah di tingkat dusun dan tingkat desa terkait anggaran yang diberikan serta program yang mau diimplemntasikan sehingga program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan tidak menggunakan nepotisme dalam memilih sasaran sehingga program yang diberikan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar kebijakan public*. Bandung: ALFABETA
- Ahmad, Dodoi Kurtubi. 2018. *Sustainable Goals SDGs dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Pekanbaru. jkt
- Edward III dalam Nugroho, 2012. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi. Media Komputindo*. Jakarta.
- Halim, Abdul Iskandar. 2015 “Peraturan Menteri Desa no. 13 tahun 2020” Jakarta.
- Halim, Abdul Iskandar, 2021 *Sosialisasi Permendesa PDTT Nomor 13 Tentang Penggunaan Dana Desa 2021* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hasan, Muhammad, Azis, Muhammad, 2018 “*Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat, Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*” Makassar.
- Hoelman, Michael, 2015 “*Panduan SDGS Untuk Pemerintah Daerah (Kotadan Kabupaten) dan Pemengku Kepentingan Daerah*” Jakarta selatan.
- Ishartono dan Santoso Tri Raharjo. 2016. *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*. Universitas padjajara
- Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini, 1987 *Teori Organisasi, Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta.
- Moleong, Lexi. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: ALFABETA
- Santosa, Djonet, 2019. “*Panduan Bagi Masyarakat Sipil Dalam Monitoring Pelaksanaan dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGS) Di Daerah*” Jakarta Selatan.
- Suratman, 2017. *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Cetakan Pertama. CAPIYA Publishing: Surabaya.
- Putri, Sindy Yulia. 2021. “*implementasi program tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals)*” *jurnal PIR: Power In Internasioanal Relations* 5 (2) :163.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 terfokus pada *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau disebut dengan SDGs Desa.
- Purwanto, E.A., & Sulistyastuti, D.R. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Cetakan Pertama*. CAPIYA Publishing: Surabaya.

Sumber lain :

- Undang-undang Perpres No 59 Tahun 2017 Tentang Tujuan Pembangunan Nasional dengan sistem berkelanjutan.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 59 Tahun 2017 (Pembangunan Berkelanjutan)
- Peraturan Menteri (Permendes) No. 21 Tahun 2020 (Pedoman Pembangunan Masyarakat Desa)

Pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Desa Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Jusuf, Gellwynn 2017 *“Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDGs)”* Jakarta Selatan: Sekretariat TPB Kementerian PPN/Bappenas.

Mediana, Desy Handayani, *“Analisis Pengaruh Penggunaan Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kediri”*, *Jurnal Ilmiah mahasiswa*, Universitas Brawijaya Malang (2019)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Jakarta:2018).

Zulphi Surya, Roberta, *Analisa Keselarasan SDGs Dengan Program Desa Seresam di Desa Seresam Kabupaten Indragiri Hulu* ISSN: 2620-3332, *Jurnal Bapeda SDGs Center*, Universitas Islam Indragiri.

Profil Desa Oabikase
RAPBDes Desa Oabikase 2022